

Geo-ekonomi: Dampak Terbentuknya Pakta Trilateral AUKUS terhadap ASEAN

Posma Sariguna Johnson Kennedy*, Yudi Sutrasna, Haetami

Fakultas Manajemen Pertahanan, Program Studi Ekonomi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia, Bogor, Indonesia

Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul, Bogor Jawa Barat, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: posmahutasoit@gmail.com

Submitted: 15/06/2022; Accepted: 24/06/2022; Published: 30/06/2022

Abstrak—Hubungan ekonomi dan politik internasional antar negara di lingkungan strategis sangat dipengaruhi oleh ketegangan yang terjadi di kawasan. Perkembangan pandangan geo-ekonomi saat ini menunjukkan percampuran antara kepentingan ekonomi dan kepentingan keamanan yang sudah mulai kabur pemisahannya. Munculnya Pakta trilateral AUKUS yang beranggotakan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat semakin meningkatkan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik, terutama dengan China. Studi ini bertujuan melihat dampak AUKUS terhadap ASEAN ditinjau dari geo-ekonomi yang telah berubah saat ini. Studi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi literatur. Sentralitas ASEAN belum mampu menghadapi tantangan ini sebagai penyeimbang sehingga setiap negara anggotanya memberikan respon yang beragam. Tantangan ke depan jauh lebih sulit karena perubahan tatanan dunia dengan persaingan antara Amerika dan China sudah bergeser ke dekat halaman rumahnya sendiri, yaitu di kawasan strategis Indo-Pasifik.

Kata Kunci: ASEAN, Amerika Serikat, Australia, , China, Geo-ekonomi, Indo-Pasifik, Pakta Trilateral AUKUS

Abstract—Regional tensions strongly influence international economic and political relations in a strategic environment. The development of the current geo-economic view shows a mixture of economic and security interests that has begun to blur the separation. The emergence of the AUKUS trilateral pact consisting of Australia, Britain and the United States has further increased tensions in the Indo-Pacific region, especially with China. This study aims to examine the impact of AUKUS on ASEAN, in terms of the geo-economics that have changed at this time. This study was prepared using qualitative research methods through literature study. ASEAN centrality has not been able to face this challenge as a counterbalance so that each member country provides a variety of responses. The challenges ahead are much more difficult because the changing world order with the competition between America and China has shifted closer to their home, in the strategic Indo-Pacific region.

Keywords: ASEAN, United States, Australia, China, Geo-Economy, Indo-Pacific, AUKUS Trilateral Pact.

1. PENDAHULUAN

Dalam melihat prospek ekonomi di suatu kawasan strategis internasional perlu ditinjau geo-politik, geo-strategis dan geo-ekonomi dari kawasan tersebut. Maju mundurnya hubungan kerjasama antar negara dan kemajuan hubungan perdagangan internasional di lingkungan strategis sangat dipengaruhi oleh ketegangan yang terjadi di antara negara-negara di lingkungannya. Situasi yang memanas antara China dan Amerika Serikat (AS) di kawasan Indo-Pasifik sangat mempengaruhi sikap negara-negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations* atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara), karena ASEAN memiliki hubungan ekonomi yang sangat baik dengan keduanya, China dan Amerika.

Tujuan pemerintahan setiap negara di kancah internasional adalah untuk menjaga kepentingan nasionalnya, yang dapat merupakan campuran dari tujuan keamanan, kemakmuran dan nilai-nilai lainnya. Tujuan yang luas ini dapat menimbulkan konflik, sehingga diperlukan kebijakan untuk mengelola pertukaran tersebut. Ada berbagai hasil geopolitik yang dapat dicapai oleh pemerintah nasional dengan menggunakan alat-alat ekonomi. Termasuk dalam mempertahankan (atau mendapatkan) keunggulan global dalam kemampuan teknologi, memperoleh atau memperkuat aliansi, melemahkan aliansi negara lain, mengubah sistem ekonomi atau politik negara lain, mempromosikan ideologi atau nilai sendiri, dan mengurangi ancaman (domestik dan global). Tujuan memaksimalkan kekuatan nasional juga termasuk didalamnya. (Golley *et al.*, 2016)

Sebuah tatanan dunia baru sedang muncul, tatanan dunia geo-ekonomi, di mana aturan, norma, dan institusi yang mengatur keterlibatan internasional sedang dibentuk kembali. Domain kebijakan ekonomi dan keamanan yang sebelumnya berbeda menjadi kabur, terutama yang berkaitan dengan investasi, perdagangan dan teknologi. Era geo-ekonomi baru menuntut cara-cara baru untuk memahami strategi yang ditempuh negara lain, dan kemudian merumuskan respons kebijakan terbaik untuk kepentingan sendiri. Sebagai akibat dari perubahan yang signifikan dan cepat dalam lanskap geopolitik, ekonomi dan teknologi, pemikiran baru tentang bagaimana mengelola risiko dan memanfaatkan peluang diperlukan untuk memaksimalkan peluang kemakmuran dan perdamaian. Konsep "geo-ekonomi" meletakkan dasar untuk mempertimbangkan cara-cara di mana pemerintah negara-negara dapat mengadopsi kebijakan yang membantu masyarakat dan ekonomi di masa depan. "Perangkat geoekonomi" dapat digunakan baik untuk efek koersif dan menguntungkan. Geo-ekonomi menyediakan kerangka kerja yang berguna untuk analisis kebijakan. (Golley *et al.*, 2016)

Di bidang geo-ekonomi, salah satu berita paling relevan adalah perjanjian trilateral yang ditandatangani oleh Australia, Inggris, dan Amerika Serikat (AUKUS) untuk membantu Australia mengembangkan dan mengerahkan kapal selam bertenaga nuklir. Penandatanganan perjanjian tersebut telah memicu berbagai respon dari pemerintah beberapa negara, khususnya di kawasan Indo Pasifik (Zambelli, 2021). Tata dunia geoekonomi baru sedang dibentuk terutama oleh meningkatnya ketegangan antara China dan Amerika Serikat, yang mencerminkan munculnya China sebagai pesaing

sejawat Amerika Serikat. Ketegangan yang meningkat ini telah menyebabkan kaburnya domain kebijakan keamanan nasional dan kebijakan ekonomi internasional yang sebelumnya lebih terpisah. Justifikasi keamanan nasional semakin mendorong perumusan kebijakan di bidang ekonomi, sementara kebijakan ekonomi semakin dilihat sebagai domain persaingan strategis. Pembuat kebijakan Australia merasa memisahkan kepentingan keamanan dan ekonomi menjadi semakin sulit. Misalnya, menanggapi permintaan dari AS atau China di satu domain kemungkinan akan menyebabkan gesekan di domain lain. Potensi gesekan ini memerlukan lebih banyak koordinasi antara kepentingan Australia yang berbeda (Golley *et al.*, 2016). Terbentuknya AUKUS menunjukkan Australia lebih memilih kepentingan keamanan daripada kepentingan ekonomi (Delanova, 2021).

Kemitraan keamanan trilateral antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, atau AUKUS, telah mendominasi diskusi tentang lanskap strategis Indo-Pasifik. Reaksi negara-negara di Asia Tenggara terhadap AUKUS sejauh ini beragam. Sementara beberapa negara khawatir bahwa AUKUS mungkin akan memicu perlombaan senjata regional, negara lainnya menyatakan harapan bahwa formulasi keamanan baru dapat berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas regional. Di luar persepsi dan kekhawatiran individu, pertanyaan tentang bagaimana AUKUS dapat berdampak pada ASEAN juga muncul. Namun, masalah utama sebenarnya adalah tantangan yang ditimbulkan oleh prakarsa-prakarsa tersebut terhadap persatuan ASEAN dalam membentuk posisi yang kuat dan kohesif dalam masalah keamanan regional. Sampai saat ini negara-negara anggota ASEAN tidak mampu mencapai konsensus tentang sikap terhadap pembentukan AUKUS. (Phua, 2021)

Berdasarkan paparan di atas, tentunya AUKUS memberikan dampak kepada ASEAN karena lokasi yang berpotensi konflik sangat dekat dengan halaman rumah. Untuk itu studi ini bertujuan melihat bagaimana dampak Pakta Trilateral AUKUS terhadap ASEAN dan respon dari negara-negara anggota ASEAN ditinjau dari perkembangan geo-ekonomi dunia.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur, dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data tanpa melakukan observasi lapangan (Creswell, 2014). Dengan demikian metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, khususnya dengan mencari, mengumpulkan, dan mengolah dokumen dari berbagai sumber literatur dan tulisan ilmiah dari penelitian sebelumnya (Melfianora, 2019). Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai buku, artikel ilmiah, dan literatur di media online yang kredibel. Beberapa teori yang mendukung penelitian dipaparkan di bawah ini untuk melihat situasi yang terjadi di Kawasan Indo Pasifik yang berdampak pada ASEAN.

2.2 Konsep Geo-ekonomi

Konsep geo-ekonomi, menjadi semakin gencar dalam perdebatan akademis dan berorientasi kebijakan. Namun, seperti yang diamati Mattlin dan (Wigell, 2016), sangat mengejutkan betapa banyak analisis kebijakan menggunakan istilah geo-ekonomi sebagai kata kunci tanpa mendefinisikannya dengan jelas, atau setidaknya mempertimbangkan bagaimana orang lain menggunakannya. Webster Dictionary memberikan definisi dari geo-ekonomi sebagai berikut “The combination of economic and geographic factors relating to international trade” (Merriam-Webster, 2022). Blackwill dan Harris (Blackwill and Harris, 2016) dalam bukunya mendefinisikan "geoekonomi" sebagai berikut: "Penggunaan instrumen ekonomi untuk mempromosikan dan membela kepentingan nasional, dan untuk menghasilkan hasil geopolitik yang bermanfaat; dan dampak tindakan ekonomi negara lain terhadap tujuan geopolitik suatu negara”.

Definisi ini merupakan titik awal dalam membuat konsep geo-ekonomi. Contoh instrumen ekonomi adalah kebijakan perdagangan dan investasi, sanksi, bantuan, bantuan pembangunan, kebijakan pendidikan tinggi, penelitian dan teknologi. Tindakan ekonomi oleh pemerintah dapat dianalisis melalui kerangka geoekonomi ketika mereka dikejar setidaknya sebagian untuk mencapai tujuan strategis (non-ekonomi), atau ketika mereka mempengaruhi kepentingan geopolitik negara lain. Salah satu contohnya adalah ketika tarif baru diterapkan atas dasar keamanan nasional, bukan (murni) untuk perlindungan industri dalam negeri. Demikian pula, bantuan asing dapat dialokasikan ke negara tertentu dengan tujuan ganda: untuk merangsang pembangunan ekonomi serta untuk memperkuat proses demokrasi dan membangun pengaruh. (Golley *et al.*, 2016)

Istilah geo-ekonomi pertama kali diciptakan oleh ahli strategi AS Edward Luttwak pada tahun 1990, selama periode di mana beberapa di AS khawatir bahwa Jepang akan menantang keunggulan globalnya dengan ekonomi daripada cara militer (Golley *et al.*, 2016). Luttwak (Luttwak, 1990) dalam artikelnya menggunakan istilah geo-ekonomi untuk menggambarkan bagaimana dalam sistem pasca Perang Dingin, arena utama persaingan antar negara akan menjadi mementingkan ekonomi daripada militer. Luttwak (Luttwak, 1993) lebih lanjut mengelaborasi ide-idenya dalam sebuah buku yang diterbitkan tiga tahun kemudian. Dengan ancaman Soviet ke Eropa dan Amerika Serikat yang berakhir, tidak dapat dibayangkan akan ada peperangan besar atau konfrontasi militer dalam waktu dekat. (Scholvin and Wigell, 2018)

Huntington (Huntington, 1993) juga mengamati bagaimana “di dunia dimana konflik militer antara negara-negara besar tidak mungkin terjadi, kekuatan ekonomi akan semakin penting dalam menentukan keunggulan atau subordinasi negara”. Oleh karena itu, dalam pandangan para ahli geoekonomi awal ini, akhir Perang Dingin tidak sama dengan 'akhir sejarah' yang diprediksi oleh Francis Fukuyama (Fukuyama, 2006). Sebaliknya, mereka meramalkan transformasi cara

konflik dimainkan – “dengan modal sekali pakai sebagai pengganti senjata, inovasi sipil sebagai pengganti kemajuan teknis militer, dan penetrasi pasar sebagai pengganti garnisun dan pangkalan” (Luttwak, 1990). Di era geo-ekonomi baru, negara-negara masih akan mengejar tujuan-tujuan nasionalnya tetapi melalui cara-cara ekonomi dan bukan militer. (Scholvin and Wigell, 2018)

Hirschman (Hirschman, 1981) dalam *National Power and the Structure of Foreign Trade*, secara khusus mengakui saling ketergantungan ekonomi sebagai sumber kerentanan, setelah mempelajari tata negara ekonomi Nazi Jerman sebelum perang (Golley *et al.*, 2016). Saling ketergantungan ekonomi ini meningkat pesat dalam skala internasional pada 1990-an, dan terlebih lagi pada 2000-an, begitu pula tantangan dan risikonya, banyak di antaranya bersifat geo-ekonomi. Sebagaimana dicatat, saling ketergantungan seringkali asimetris, artinya memerlukan sumber kekuatan dalam hubungan tawar-menawar, seperti yang telah ditunjukkan oleh Keohane & Nye (Keohane and Nye, 1977) dalam buku mereka. Risiko yang dihasilkan dari saling ketergantungan, dan yang mempengaruhi negara secara asimetris, termasuk gangguan pada rantai pasokan global dan arus perdagangan gelap serta penggunaan kerentanan asimetris sebagai pengungkit strategis (World Economic Forum, 2016). Kerentanan ini mendorong keamanan ekonomi ke pusat agenda global dan menyarankan bahwa perhitungan geo-ekonomi harus menjadi yang terpenting dalam perhatian kekuatan besar dan kecil dalam kalkulus strategis mereka (Wigell, 2016). (Scholvin and Wigell, 2018)

Apa yang sekarang disebut strategi geo-ekonomi seperti yang dilakukan oleh semua kekuatan besar di masa lalu telah memberikan hasil positif bagi banyak negara yang telah menuai manfaat ekonomi dan keamanan dari strategi ini. Geoekonomi menyediakan "perangkat" yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengejar tujuan yang berbeda dari setiap negara. (Golley *et al.*, 2016)

2.3 Teori Neorealisme

Sikap negara-negara pendiri AUKUS dapat dijabarkan dengan menggunakan teori neorealisme, yang menyatakan bahwa sudah menjadi hukum alam bahwa setiap negara harus mengembangkan militer yang kuat untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam politik internasional yang anarkis. Jika tidak, negara harus menerima konsekuensi dapat ditaklukkan dalam perang dan diperbudak oleh negara lain (Hadiwinata, 2017). Kondisi anarki, dimana tidak adanya otoritas pusat yang dapat menegakkan hukum dan memelihara sistem akan mengakibatkan negara-negara saling bersaing dalam meningkatkan kekuatannya, terutama di bidang militer. Dalam situasi ini, kekuatan militer yang lebih besar akan memungkinkan suatu negara untuk mendominasi dan mempengaruhi negara lain (Ambarwati and Wijatmadja, 2016). Melalui teori Neorealisme, dapat dipahami alasan mengapa Australia, Inggris, dan Amerika Serikat membentuk pakta pertahanan, yaitu untuk memperkuat militer, khususnya militer Australia, dengan merencanakan pembangunan kapal selam bertenaga nuklir. (Muntasyir, Panji and Santoso, 2022)

2.4 Pakta Trilateral AUKUS

Kerjasama trilateral AUKUS merupakan tanggapan terhadap keamanan regional yang sudah tegang. AUKUS dapat dilihat sebagai mekanisme bagi negara-negara seperti Australia untuk mengatasi kerentanan mereka terhadap keamanan regional. Bagi AS, AUKUS adalah manifestasi terbaru dari pendekatan multilateral luas dan ambisinya dalam mempertahankan keunggulan Amerika di kawasan itu. AS secara eksplisit dengan mengatakan bahwa China tidak akan mencapai tujuannya menjadi negara paling kuat di bawah pengawasannya. AUKUS merupakan ekspresi lain dari kepentingan Amerika di kawasan ini, melalui kerja sama dengan sekutu dan jaringan mitra yang berpikiran sama yang ditargetkan untuk meredam perilaku agresif China. (Phua, 2021)

Pembentukan AUKUS, dan khususnya keputusan untuk mengeksplor kapal selam bertenaga nuklir (SSN), telah menimbulkan reaksi beragam di antara mitra Amerika di Asia Timur. Reaksi-reaksi ini sebagian besar dicerminkan oleh dua pendekatan yang bersaing: memperkuat supremasi militer dalam menghadapi kebangkitan Cina, di satu sisi, dan mencoba menghindari "Perangkap Thucydides" di sisi lain. "Perangkap Thucydides" khawatir bahwa AUKUS dapat memicu perlombaan senjata (nuklir) dan akan memperburuk ketegangan di Asia Timur. Diantaranya: Indonesia, Malaysia dan Singapura, Thailand serta mitra dekat China, Laos dan Kamboja, meskipun mereka belum menyatakan posisi yang jelas. (Julienne, 2021)

Negara-negara Asia Tenggara secara ekspresif jelas tidak ingin terlibat dalam politik kekuatan besar. ASEAN sangat berhati-hati sejauh melihat AUKUS sebagai upaya untuk melawan agresifitas China yang tumbuh di kawasan. Pada saat yang sama, memburuknya hubungan Australia-China dengan cepat dan meningkatnya aktivitas militer di Laut China Selatan dan Selat Taiwan, yang menunjukkan realitas lingkungan keamanan regional. (Phua, 2021)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Era Baru Geo-Ekonomi

Era baru melihat penekanan yang lebih besar pada keamanan, karena kemakmuran dan keamanan telah menjadi fungsi yang semakin kompleks satu sama lain. Ini kontras dengan tiga dekade terakhir di bawah sistem internasional adalah unipolar, ketika bobot kemakmuran (misalnya, "lapangan kerja dan pertumbuhan") jauh lebih tinggi daripada keamanan (dalam hal persaingan antar negara di antara kekuatan besar). (Golley *et al.*, 2016)

Kali ini berbeda. Bedanya adalah pertama kalinya hegemon dunia, Amerika Serikat, secara bersamaan menghadapi pesaing ekonomi dan strategis di satu negara yang sama (China). Ini terjadi di tengah masa dimana teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan batas baru yang memungkinkan bentuk-bentuk baru tata negara. Pergeseran dari sistem internasional unipolar kembali ke sistem multipolar menunjukkan bahwa akan terlihat lebih banyak konflik muncul. Perluasan fisik ke domain cyber berarti bahwa beberapa dari konflik itu akan mengambil bentuk yang sebelumnya tidak diketahui. Untuk alasan ini, kita akan melihat negara-negara bereksperimen dengan perangkat geoekonomi yang diperluas dalam beberapa tahun mendatang. (Golley *et al.*, 2016)

Sementara, sebagian besar tulisan Luttwak masih sangat relevan saat ini. Dengan mengidentifikasi lima tren global baru yang bermanifestasi di persimpangan politik, ekonomi, teknologi, dan masyarakat yang telah memunculkan tatanan baru ini (Golley *et al.*, 2016):

1. Meningkatnya persaingan strategis antara Amerika dan China, dipicu oleh kemunculan China yang cepat sebagai kekuatan besar, dimana model tatanan politik dan organisasi ekonominya sangat berbeda dengan Amerika Serikat.
2. Kebijakan domestik pemerintah China dan strategi serta pengaruh internasionalnya, termasuk *The Belt and Road Initiative*-nya.
3. Perluasan masalah keamanan nasional yang mencakup semakin banyak domain kebijakan, termasuk dalam perdagangan dan investasi internasional.
4. Melemahnya tatanan berbasis aturan yang muncul di bawah kepemimpinan Amerika pada periode pasca-perang, baik karena tantangan yang ditimbulkan oleh China dan negara-negara non-Barat lainnya, maupun tantangan dari hilangnya legitimasi di mata publik Barat.
5. Tingkat saling ketergantungan global yang sangat tinggi dan belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk arus manusia, pengetahuan, barang dan modal, serta konektivitas di ruang siber.

Beijing dan Washington, serta ibu kota lainnya, kini terlibat dalam persaingan kekuatan besar yang semakin kompetitif. Selama beberapa dekade proses globalisasi dengan situasi institusi global yang mendorong saling ketergantungan ekonomi. Ini dianggap sebagai pendorong perdamaian dan kemakmuran, setidaknya di dunia kapitalis. Saling ketergantungan ekonomi ini semakin dilihat oleh analis keamanan sebagai sumber kerentanan dan ketidakamanan. (Golley *et al.*, 2016)

3.2 Tanggapan Negara-Negara di Asia Tenggara terhadap AUKUS

Tanggapan Asia Tenggara bervariasi. Malaysia dan Indonesia menyatakan keprihatinan tentang risiko perlombaan senjata, sementara Singapura, Vietnam dan Filipina umumnya lebih menerima pengaturan tersebut. Dimana klaim China atas wilayah Laut Cina Selatan memang ditentang oleh negara-negara Asia Tenggara, seperti Vietnam, Malaysia, Indonesia dan Filipina (Djalal, 2021a).

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob menyatakan keprihatinannya bahwa pengaturan keamanan baru dapat menjadi katalis untuk perlombaan senjata nuklir di wilayah tersebut dan mungkin akan dapat memprovokasi beberapa pihak atau negara untuk bertindak agresif, terutama di Laut Cina Selatan. Dalam menyampaikan keprihatinan ini, dia menekankan komitmen Malaysia terhadap Asia Tenggara sebagai Zona Damai, Kebebasan, dan Netralitas (ZOPFAN) dan Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANFWZ), serta sikap Malaysia untuk tidak mengizinkan kapal bertenaga nuklir masuk ke perairan teritorialnya (Shirodkar, 2021). Malaysia khawatir bahwa, meskipun Australia tidak diatur untuk memperoleh senjata nuklir berdasarkan perjanjian tersebut, transfer teknologi nuklir untuk menggerakkan kapal selam Australia mungkin merupakan ujung dari senjata nuklir (Djalal, 2021a). Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Malaysia telah memperingatkan bahwa meningkatnya kehadiran kapal perang asing di Laut Cina Selatan dan berisiko memicu konfrontasi militer (Rajak, 2019). Malaysia telah mempertahankan pendiriannya atas klaim teritorial dan hak ZEE-nya, menolak klaim sembilan garis putus-putus China dan mempertahankan hubungan pertahanan yang erat dengan AS, Australia dan, melalui Five Powers Defense Arrangements (FPDA), Inggris (Storey, 2020). Mengingat perilaku agresif China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malaysia, diragukan bahwa lembaga keamanan nasional negara itu sama khawatirnya dengan AUKUS seperti yang tampak pada politisi Malaysia. (Choong and Storey, 2021)

Kementerian Luar Negeri Indonesia pada 17 September 2021 mengatakan “dengan hati-hati” mengenai AUKUS, dan menekankan bahwa Jakarta “sangat prihatin” atas “perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan yang terus berlanjut di kawasan”. Indonesia meminta Australia untuk terus memenuhi kewajiban non-proliferasi nuklirnya, dan meminta Canberra untuk mempertahankan komitmennya terhadap perdamaian dan keamanan regional sesuai dengan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (TAC), dimana Australia juga merupakan Penandatanganan Kontrak Tinggi. Namun perlu dicatat bahwa ketakutan Indonesia tentang “perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan yang berkelanjutan”, tidak hanya mengacu pada tiga mitra AUKUS, tetapi semua negara kawasan, termasuk China. Penilaian AUKUS datang dari diplomat senior Indonesia Abdul Kadir Jailani. Melalui tulisannya di Jakarta Post, dia menggemakan penilaian pemerintahnya, tetapi mencatat bahwa tidak ada norma internasional yang tampaknya telah dilanggar. Dia menambahkan bahwa “percakapan yang lebih dalam” tentang AUKUS akan membantu membangun rasa saling percaya, percaya diri, dan diplomasi (Kemlu RI, 2021). Kekhawatiran tentang perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan perlu diatur dalam perspektif yang tepat. AUKUS akan memicu perlombaan senjata adalah kebalikan dari logika sebab-akibat. Jelas bahwa AUKUS adalah akibat langsung dari “tindakan yang semakin provokatif” China (Edel, 2021). (Choong and Storey, 2021)

Tanggapan dari Filipina menimbulkan perpecahan serius dalam pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte atas masalah keamanan nasional. Sejak Presiden Rodrigo Duterte menjabat pada tahun 2016, hubungan AS-Filipina berada di bawah tekanan, karena janjinya untuk "menceraikan" Amerika dan mencari hubungan yang lebih dekat dengan China dan Rusia. Hal ini mengakibatkan pengurangan beberapa keterlibatan pertahanan bilateral (diperparah oleh pandemi COVID-19) dan ancaman Duterte untuk mengakhiri Perjanjian Kunjungan Pasukan (VFA) 1999—ancaman yang baru ditarik pada bulan Juli selama kunjungan ke Manila oleh AS Menteri Pertahanan Lloyd Austin (Storey, 2020). Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa setelah pengumuman AUKUS, juru bicara kepresidenan Harry Roque mengatakan bahwa Duterte khawatir pakta tersebut dapat memicu "perlombaan senjata nuklir" (Gita-Carlos, 2021). Sebelum pernyataan Rodrigo, dua anggota kunci kabinet Duterte telah mendukung penuh AUKUS. Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana menyatakan bahwa adalah hak Australia untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya seperti yang juga dilakukan Filipina untuk melindungi wilayahnya (Nepomuceno, 2021). (Choong and Storey, 2021)

Menteri Luar Negeri Filipina, Locsin mengeluarkan pernyataan ilmiah yang menyambut baik pembentukan AUKUS dan menyampaikan tiga poin penting (Department of Foreign Affairs of Philippines, 2021). Pertama, anggota ASEAN, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tidak memiliki kemampuan militer untuk menjamin perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara. Kedua, dengan penyeimbang utama kawasan, AS, yang secara geografis jauh, penguatan kemampuan proyeksi kekuatan Australia akan membantu menjaga keseimbangan kekuatan regional dan memungkinkan Canberra untuk merespons ancaman yang dihadapi kawasan dengan lebih baik. Ketiga, karena Australia tidak berusaha memperoleh senjata nuklir, AUKUS tidak melanggar SEANFWZ atau komitmen Canberra terhadap Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) atau sentralitas ASEAN. Dukungan Lorenzana dan Locsin untuk AUKUS mencerminkan dukungan lembaga keamanan nasional Filipina untuk sistem aliansi AS dan kekhawatiran yang berkembang tentang kebijakan tegas China di Laut China Selatan. (Choong and Storey, 2021)

Reaksi Singapura terhadap AUKUS relatif terukur, dan mencerminkan dukungan negara itu terhadap pengerahan pasukan militer AS di kawasan itu. Setelah diberi pengarahan tentang AUKUS dari Australia oleh Scott Morrison, Perdana Menteri Lee Hsien Loong mencatat hubungan antara Singapura dan Australia. Ia berharap AUKUS dapat memberikan kontribusi yang konstruktif bagi perdamaian dan stabilitas kawasan serta melengkapi arsitektur kawasan (Singapore Government Agency, 2021) Menteri Luar Negeri Balakrishnan mengungkapkan sentimen yang sama. Dia mencatat bahwa Singapura memiliki hubungan jangka panjang dengan ketiga anggota AUKUS, dan bahwa "kepercayaan dan keselarasan yang besar" seperti itu "sangat membantu". Ini berarti bahwa Singapura tidak "terlalu cemas" tentang perkembangan baru. 25 Poin kuncinya, kata menteri, adalah bahwa AUKUS adalah "bagian dari penataan kembali geo-strategis yang lebih besar". Singapura harus mengambil langkah dan memastikannya tidak berakhir pada posisi yang "tidak layak atau berbahaya". Dari perspektif yang lebih luas, AUKUS sebenarnya bukanlah "pusat perhatian", dan pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana pengelolaan hubungan AS-China. (Choong and Storey, 2021)

Pendekatan Vietnam terhadap menggarisbawahi realitas yang terjadi di regional. Kementerian Luar Negeri mencatat bahwa semua negara harus bekerja menuju tujuan perdamaian, stabilitas, kerja sama, dan pembangunan yang sama di kawasan. Vietnam menekankan bahwa energi nuklir yang digunakan untuk armada kapal selam baru Australia harus digunakan untuk tujuan damai, melayani pembangunan sosial-ekonomi, dan memastikan keselamatan bagi manusia dan lingkungan (Anh, 2021). Reaksi Vietnam tidak terduga, perselisihan lama Hanoi dengan China di Laut China Selatan telah membuatnya mengejar hubungan yang lebih kuat dengan AS. Sementara Hanoi belum menyatakan dukungan terbuka dan publik untuk strategi FOIP ("Free and Open Indo-Pacific atau Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka") namun telah menyatakan dukungan untuk prinsip-prinsip FOIP, seperti pentingnya menjaga kebebasan navigasi dan menyelesaikan perselisihan secara damai dan sesuai dengan hukum internasional (Chatys, 2021). Pada bulan September 2021, Hanoi menandatangani perjanjian dengan Jepang untuk transfer peralatan dan teknologi pertahanan. Kelompok yang dipimpin AS, memainkan "peran penting" dalam melawan agresifitas China. AUKUS harus membawa "kepercayaan baru" ke negara-negara yang menentang klaim maritim China yang berlebihan (Radio FA, 2021)". (Choong and Storey, 2021)

Sebagai sekutu AS tetapi juga mitra dekat China, Thailand menanggapi AUKUS dengan kehati-hatian. Thailand ingin menjaga hubungan baik dengan kedua belah pihak dan tidak ingin mengambil posisi dalam pengaturan trilateral dan berisiko menyinggung Washington atau Beijing. Bagaimanapun, pemerintah Thailand disibukkan dengan masalah politik domestik dan memiliki sedikit bandwidth untuk masalah keamanan regional. Dengan demikian, belum ada tanggapan resmi dari kantor perdana menteri atau kementerian luar negeri atau pertahanan. Sepuluh hari setelah AUKUS diumumkan, Perdana Menteri Prayut Chan-o-Cha menyampaikan pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa di mana ia menjanjikan dukungan Thailand untuk Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir (yang tidak ditandatangani oleh Australia) dan NPT-nya. Referensinya pada dua perjanjian ini bisa menjadi tanda bahwa Thailand memiliki keraguan tentang AUKUS. Mantan menteri luar negeri Thailand Piromya, menyatakan bahwa tidak ada negara yang ingin didominasi oleh China dan oleh karena itu kehadiran militer AS diperlukan, dan mungkin dengan perluasan, dari sekutu dan mitranya. (Choong and Storey, 2021)

3.3 Kebijakan yang Dilakukan Negara-negara AUKUS Berdasarkan Geo-ekonomi

Australia merilis pernyataan yang menegaskan "komitmen teguh" terhadap Sentralitas ASEAN. Dengan tegas Canberra mengklarifikasi bahwa tidak akan berusaha mengembangkan kemampuan senjata nuklir bahkan jika inisiatif baru akan memungkinkannya untuk mengerahkan armada kapal selam bertenaga nuklir. Perwakilan negara dari pendukung AUKUS

juga telah menjangkau berbagai pemimpin Asia Tenggara untuk membahas aliansi baru dan ambisinya untuk berkontribusi secara konstruktif bagi perdamaian regional (Phua, 2021). Canberra meyakinkan Jakarta tentang dukungan Australia untuk sentralitas ASEAN. Namun, penting bagi Australia untuk menindaklanjuti penguatan praktik dan penerapan sentralitas ASEAN, yang merupakan inti dari kontribusi ASEAN terhadap stabilitas regional di halaman belakang Australia. (Djalal, 2021a)

Pembaruan Strategis Pertahanan Australia pada tahun 2020 mencatat bahwa lingkungan strategis Canberra telah memburuk lebih cepat daripada yang diantisipasi sejak buku putih pertahanannya diluncurkan tahun 2016. Meskipun ada beberapa referensi eksplisit ke China, jelas bahwa pembangunan militer Beijing adalah fokus utama keprihatinan Canberra. Peningkatan 6,4 persen dalam pembelanjaan pertahanan China pada tahun 2020 (US\$9 miliar secara riil) merupakan lebih besar dari gabungan dari peningkatan riil negara-negara kawasan Indo-Pasifik pada tahun itu. Pemaksaan ekonomi China terhadap Australia, termasuk pengenaan tarif tinggi pada produk Australia, setelah Canberra menyerukan penyelidikan tentang asal-usul virus corona, juga berperan dalam keputusan Australia untuk memperkuat kemampuan proyeksi kekuatannya. (IISS, 2021)

Pada 21 Oktober 2021, Menteri angkatan bersenjata Inggris James Heappey menyatakan bahwa telah terjadi “overhyping” kontroversi atas AUKUS. Dia menjelaskan bahwa perjanjian trilateral baru tidak dimaksudkan untuk “menantang orang lain”, tetapi tambahan Australia ke dalam kemitraan berbagi teknologi lama antara AS dan Inggris. (Phua, 2021)

Di Asia Tenggara, Presiden AS Joe Biden menyatakan Amerika Serikat akan kembali mengejar ketinggalannya. Empat tahun terakhir modal diplomatik dan politik Washington berkurang di wilayah ASEAN. Amerika Serikat tidak memiliki inisiatif regional yang signifikan. Pada 2017, Presiden Trump menghadiri KTT ASEAN-AS di Filipina, tetapi melewatkan keempat KTT Asia Timur selama masa jabatannya. Kedutaan AS di empat negara ASEAN (Singapura, Brunei, Thailand, dan Filipina) telah beroperasi tanpa duta besar, dan Amerika Serikat adalah satu-satunya negara besar yang tidak memiliki perwakilan tetap di Sekretariat ASEAN. Pemerintahan Biden melakukan langkah-langkah untuk membalikkan arah, memperbaiki kerusakan, dan memulihkan kredibilitas AS. Langkah pertamanya dalam kebijakan luar negeri, adalah memenangkan kembali sekutu dan mitra sambil mendorong musuh. (Djalal, 2021b)

Untuk pertama kalinya dalam empat tahun, AS mengirimkan perwakilan tertingginya untuk bertemu dengan para pemimpin ASEAN di KTT ASEAN pada 26 Oktober 2021. AS berusaha meyakinkan para pemimpin kawasan bahwa AS mendukung Sentralitas ASEAN dan peran ASEAN dalam arsitektur kawasan Indo-Pasifik. Namun ASEAN perlu menyesuaikan dan menghidupkan kembali posisinya sebagai jantung arsitektur keamanan kawasan. Untuk tujuan ini, perlu menemukan kesamaan dan memperdalam kerjasama dengan berbagai mekanisme regional. Dalam beberapa hal, itu dapat membantu menumbuhkan kepercayaan strategis yang dapat mengurangi beberapa keraguan yang dimiliki masing-masing negara. Di sisi lain, bekerja sama untuk memecahkan masalah yang ditargetkan, menunjukkan kapasitas ASEAN untuk bekerja sama secara praktis terlepas dari tantangan yang dihadapinya. (Phua, 2021)

3.4 Tanggapan China

Walaupun klaim China atas wilayah Laut Cina Selatan ditentang keras oleh negara-negara Asia Tenggara, seperti Vietnam, Malaysia, Indonesia dan Filipina, namun China dan ASEAN menyepakati rancangan yang akan menjadi dasar *Code of Conduct* atau kode etik di Laut Cina Selatan. Dengan *Code of Conduct* tersebut ASEAN dan China berharap sengketa klaim di Laut Cina Selatan dapat diselesaikan secara aktif terhadap kedua Negara, yakni China dan Amerika Serikat. (Djalal, 2021a)

China memperingatkan bahwa AUKUS akan merusak perdamaian dan stabilitas regional, memperburuk perlombaan senjata dan mengganggu upaya non-proliferasi nuklir internasional. Beberapa komentator China mengakui bahwa Australia memainkan “peran penting” di kawasan itu. Mereka juga melihat kesepakatan trilateral sebagai tanda bahwa negara-negara bersedia bersatu untuk melawan Beijing. (Mastro and Cooper, 2021)

Berkenaan dengan Australia, media resmi pemerintah China telah secara langsung mengancam Canberra. Sebuah editorial dari *Global Times*, misalnya, berbunyi: jika perlu, “China pasti akan menghukum [Australia] tanpa ampun”, dan (...) “Pasukan Australia juga kemungkinan besar menjadi angkatan pertama tentara Barat yang menyia-nyaiakan mereka. tinggal di Laut Cina Selatan.” Sejauh ini memberikan nasihat militer kepada Australia: “Baru-baru ini, beberapa orang di Canberra mengusulkan sistem pertahanan rudal Australia. Kami percaya ini perlu (*Global Times*, 2021b)”. (Julienne, 2021)

Langkah AS juga memicu retorika China. Pertama, AUKUS memperkuat argumen bahwa AS pada akhirnya adalah sekutu yang tidak dapat diandalkan (Sheng, 2021). Seperti ketika Amerika menarik diri dari Afghanistan, dan menuduh Washington meninggalkan sekutunya ketika tidak lagi membutuhkan mereka (*Global Times*, 2021a). Kedua, AUKUS justru digunakan China untuk menggembelng nasionalisme di dalam negeri, memberikan dukungan untuk propaganda di China yang berada di bawah ancaman dari AS. Hal ini kemungkinan akan memicu strategi ofensif China yang sedang berlangsung di Asia Timur. Selama beberapa bulan terakhir, China telah meningkatkan agresifitasnya terhadap tetangga maritimnya melalui operasi udara militer terhadap Taiwan, Jepang atau Malaysia, militerisasi penjaga pantainya, dan penggunaan milisi maritim tanpa hambatan, terutama terhadap Filipina. Akibatnya, sikap yang lebih agresif mungkin akan ditunjukkan China di bulan-bulan mendatang. (Julienne, 2021)

3.5 Sikap ASEAN terhadap AUKUS

ASEAN menyambut baik persaingan terbuka antara kekuatan-kekuatan besar di kawasan, dengan cara yang tepat (yaitu persaingan dalam damai dan untuk kemajuan). Negara-negara ASEAN diuntungkan dari persaingan positif antara Cina, Amerika Serikat dan Jepang, misalnya, untuk peluang perdagangan, investasi, dan pendidikan. Apa yang tidak diinginkan ASEAN adalah jenis persaingan *zero-sum* yang akan menciptakan ketegangan, ketidakpercayaan, dan perpecahan dan dengan demikian (sekali lagi) memisahkan kawasan itu. (Djalal, 2021b)

Negara-negara ASEAN menginginkan persaingan dengan cara-cara yang benar di kawasan, yaitu (Djalal, 2021):

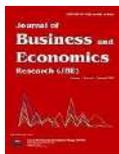
- Pertama, mereka tidak ingin melihat meningkatnya persaingan AS-China di Asia Tenggara, wilayah yang telah menjadi pusat konflik antara kekuatan besar di masa lalu dan bisa menjadi seperti itu lagi. Negara-negara ASEAN tidak ingin terpolarisasi, ditarik ke arah yang berbeda oleh kekuatan yang berbeda, dan melihat kohesi komunitas ASEAN dirusak. Negara-negara ASEAN berharap bahwa pemerintahan AS akan menurunkan suhu, nada, dan ketegangan hubungan AS-China dan menjaga persaingan tetap terkendali.
- Kedua, adalah kepentingan nasional negara-negara ASEAN untuk menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat dan China. Mereka semua ingin mendapatkan keuntungan dari kedua kekuatan tersebut. Mereka percaya bahwa Asia Tenggara, dan Indo-Pasifik, memiliki banyak ruang untuk keterlibatan kedua negara adidaya. Dengan demikian, negara-negara ASEAN tidak ingin melihat pengulangan kata-kata kasar anti-China yang agresif yang diucapkan AS.
- Ketiga, negara-negara Asia Tenggara tidak ingin melihat erosi sentralitas ASEAN—prinsip bahwa ASEAN, yang menyatukan kelompok negara yang semakin kohesif, harus mengambil alih urusan di kawasan. Sentralitas ASEAN menganggap bahwa negara-negara besar memiliki kepercayaan strategis di ASEAN dan bersedia membiarkan organisasi tersebut memimpin beberapa aspek urusan regional. Kredibilitas ASEAN tergantung pada kemampuannya untuk menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar: Amerika Serikat, Cina, Rusia, Jepang, Uni Eropa, dan India. Karena itu, ASEAN tidak mau memihak dan tidak mau dipaksa. Memilih satu sisi secara otomatis akan berarti mengasingkan yang lain. Melakukan hal itu akan memposisikan kembali ASEAN pada hubungan yang kompleks.

Asia Tenggara ingin melihat Amerika Serikat dan China bekerja sama di kawasan mereka. Xi pernah menyerukan “jenis baru hubungan kekuatan besar” dengan Amerika Serikat berdasarkan “solusi menang-menang.” Biden telah mengkonfirmasi bahwa pemerintahannya menginginkan “persaingan, bukan konflik” dengan China dan “siap untuk bekerja dengan Beijing ketika kepentingan Amerika untuk melakukannya.” Blinken juga mengatakan bahwa “hubungan AS dengan China akan kompetitif ketika seharusnya, kolaboratif ketika bisa.” Dengan kata-kata yang membesarkan hati ini, dapatkah salah satu pihak mengatasi ego strategisnya dan mulai menjajaki jalan untuk kerja sama, dan Asia Tenggara menjadi tempat di mana beberapa bentuk kerja sama nyata AS-China terjadi. Tidak ada kekurangan masalah bagi Washington dan Beijing untuk mengeksplorasi kerja sama di: industri, infrastruktur, keamanan maritim, pembajakan, iklim, lingkungan, energi hijau, bencana alam, COVID-19, pertukaran pemuda, dan sebagainya. Meskipun ini tidak akan mengubah persaingan mereka dalam skala global, hal itu mungkin hanya mengubah tekstur hubungan AS-China di Asia Tenggara. Itu akan cukup baik untuk ASEAN. (Djalal, 2021b)

Bagaimanapun, ASEAN merupakan kawasan yang berpengalaman terhadap daftar panjang konflik yang tampaknya tidak dapat diselesaikan, namun dapat diubah menjadi kerja sama yang langgeng, seperti: antara Indonesia dan Malaysia, Indonesia dan Singapura, Malaysia dan Singapura, Indonesia dan Timor Leste, Malaysia dan Filipina, Vietnam dan Kamboja -daftarinya terus berlanjut. Negara-negara di kawasan ini telah menunjukkan bahwa permusuhan dapat berubah menjadi persahabatan. Hal ini benar-benar tergantung pada apakah ada kemauan politik dan tipu muslihat diplomatik dalam melakukannya. Natalegawa, (Mantan menteri luar negeri Indonesia), pernah mengajukan gagasan 'perjanjian Indo-Pasific' yang akan sama saja dengan menerapkan norma-norma Traktat Persahabatan Kerjasama (TAC) ASEAN ke wilayah Indo-Pasifik yang lebih luas. (Djalal, 2021b)

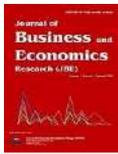
4. KESIMPULAN

Di era saat ini kepentingan ekonomi dan keamanan suatu negara sudah mulai kabur batas-batasnya. Inilah yang membedakan pendekatan geo-ekonomi dahulu dan sekarang. Pada awalnya geo-ekonomi lahir setelah berakhirnya Perang Dingin, sehingga negara-negara lebih memikirkan tujuan ekonomi di negaranya dibandingkan keamanan melalui pengembangan militer. Sejak tahun 2000-an terjadi perubahan pandangan mengenai geo-ekonomi dimana kedua tujuan tersebut mulai dipikirkan sama pentingnya, bahkan kadang kepentingan keamanan dirasa jauh lebih penting dibanding kepentingan ekonomi. Terbentuknya pakta trilateral AUKUS menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi Australia kalah dengan kepentingan keamanan, karena merasa terancam dengan agresifitas China sehingga dimana mulai merasa terganggu kepentingannya. Selain itu dorongan munculnya AUKUS dapat dimungkinkan karena ketidakmampuan nyata ASEAN dalam merespons secara efektif perubahan lingkungan geopolitik yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik. AUKUS merupakan tanggapan terhadap modernisasi alat perang militer China, dimana ASEAN belum mampu menghadapinya dan memberikan posisi yang seimbang. Ini merupakan “*wake up call*” bagi ASEAN dalam menghadapi tantangan ke depan untuk menjaga keamanan regional dan tetap menjaga momentum perekonomiannya, melalui kebijakan geo-ekonominya secara hati-hati. Masalah ke depan masih dihadapi oleh ASEAN, karena respon setiap negara anggota yang berbeda-beda dalam menghadapi pakta trilateral AUKUS ini. Hal ini menunjukkan belum adanya kesatuan dan kesamaan pemikiran yang kokoh di tubuh ASEAN sendiri..



REFERENCES

- Ambarwati and Wijatmadja, S. (2016) *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Intrans Publishing.
- Anh, T. (2021) 'Vietnam Spells Out Stance on AUKUS', *Hanoi Times*, 23 September. Available at: <https://hanoitimes.vn/vietnam-spells-out-stance-on-aukus-318802.html>.
- Blackwill, R. and Harris, J. M. (2016) *War by other means*, Harvard University Press. Cambridge: Harvard University Press.
- Chatys, M. (2021) 'Vietnam and Japan Partners Amid Superpower Rivalry', *FULCRUM*, 1 October. Available at: <https://fulcrum.sg/vietnam-and-japan-partners-amid-superpower-rivalry/>.
- Choong, W. and Storey, I. (2021) *Southeast Asian Responses to AUKUS: Arms Racing, Non-Proliferation and Regional Stability, Perspective*.
- Creswell, J. W. (2014) *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. 4th ed., SAGE Publications, Inc. 4th ed. California 91320: SAGE Publications, Inc.
- Delanova, M. O. (2021) 'Dampak Pakta Pertahanan Trilateral Aukus Terhadap Kondisi Regional Indo-Pasifik', *Jurnal Dinamika Global*, 6(02), pp. 259–285. doi: 10.36859/jdg.v6i2.408.
- Department of Foreign Affairs of Philippines (2021) 'Statement of the Honorable Teodoro L. Locsin, JR. Secretary of Foreign Affairs On the Australia-United Kingdom-United States (AUKUS) Enhanced Trilateral Security Partnership', *Dfa.Gov.Ph*. Available at: <https://dfa.gov.ph/dfa-news/statements-and-advisoriesupdate/29484-statement-of-foreign-affairs-teodoro-l-locsin-jr-on-the-australia-united-kingdom-united-states-aukus-enhanced-trilateral-security-partnership>.
- Djalal, D. P. (2021a) 'ASEAN responses to AUKUS security dynamic', *East Asia Forum Quarterly*. Available at: <https://www.eastasiaforum.org/2021/11/28/asean-responses-to-aukus-security-dynamic/>.
- Djalal, D. P. (2021b) 'Can Biden bring peace to Southeast Asia?', *Asia Research Institute, NUS*. Available at: <https://ari.nus.edu.sg/app-essay-dino-djalal/>.
- Edel, C. (2021) 'China Has Only Itself to Blame for AUKUS', *foreignpolicy.com*, 24 September. Available at: <https://foreignpolicy.com/2021/09/24/china-aukus-submarines-defense/>.
- Fukuyama, F. (2006) *The end of history and the last man*. Reissue ed, Free Press. Reissue ed. Stanford: Free Press.
- Gita-Carlos, R. A. (2021) 'Duterte "concerned" over AUKUS nuclear submarine deal', *Philippine News Agency*. Available at: <https://www.pna.gov.ph/articles/1154907>.
- Global Times (2021a) 'Afghan abandonment a lesson for Taiwan's DPP', *The Global Times*. Available at: <https://www.globaltimes.cn/page/202108/1231636.shtml>.
- Global Times (2021b) 'AUKUS to bring "nuclear-powered submarine fever" across globe: Global Times editorial', *Global Times*. Available at: <https://www.globaltimes.cn/page/202109/1234459.shtml>.
- Golley, J. et al. (2016) 'Goeconomic Brief # 1 — Context and Concepts'. Australian National University Public Policy and Societal Impact Hub.
- Hadiwinata, B. S. (2017) 'Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektifis.', *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*, p. 22.
- Hirschman, A. O. (1981) *National Power and the Structure of Foreign Trade*. Expanded e, University of California Press. Expanded e. California: University of California Press. doi: 10.2307/3017772.
- Huntington, S. P. (1993) 'Why International Primacy Matters', *International Security*, 17(4), pp. 68–83. Available at: <http://www.jstor.org/stable/2539022>.
- IISS (2021) *The Military Balance 2021*. 1st Editio, Routledge. 1st Editio. The International Institute for Strategic Studies (IISS).
- Julienne, M. (2021) 'AUKUS Rocks the Boat in the Indo-Pacific: And It's Not Good News', *Editoriaux De L'ifri*, pp. 1–5.
- Kemlu RI (2021) *Statement on Australia's Nuclear-powered Submarines Program*. Available at: https://kemlu.go.id/portal/en/read/2937/siaran_pers/statement-on-australias-nuclear-poweredsubmarines-program.
- Keohane, R. O. and Nye, J. S. (1977) *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Michigan: Little, Brown.
- Luttwak, E. N. (1990) 'From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce', *The National Interest*, Summer(20), pp. 17–23. Available at: <http://www.jstor.org/stable/42894676>.
- Luttwak, E. N. (1993) *The Endangered American Dream: How to stop the United States from becoming a third-world country and how to win the geo-economic struggle for industrial supremacy*, Simon & Schuster. New York.
- Mastro, O. S. and Cooper, Z. (2021) *In Defence of AUKUS*, *The Interpreter - Lowy Institute*. Available at: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/defence-aukus>.
- Melfianora (2019) *Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur, OSF*. Available at: <https://osf.io/efmc2/#/>
- Merriam-Webster (2022) *geo-economics noun, Merriam-Webster Dictionary*. Available at: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/geo-economics> (Accessed: 19 April 2022).
- Muntasyir, M. B., Panji, M. and Santoso, T. (2022) 'SOUTHEAST ASIA 'S GEOPOLITICAL DYNAMICS IN', *Jurnal Hubungan Internasional LINO*, 2(1), pp. 31–43.
- Nepomuceno, P. (2021) 'Australia has right to improve sub defense capability: Lorenzana', *Philippine News Agency*, 17 September. Available at: <https://www.pna.gov.ph/articles/1153864>.
- Phua, A. T. (2021) 'AUKUS: ASEAN's Hesitant Response', *Rsis*, 29 October. Available at: <https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/aukus-aseans-hesitant-response/#.Ygd3mN9BzIU>.
- Rajak, R. (2019) 'Warships in South China Sea will invite conflict, says Dr M', *Malay Mail*, 21 October. Available at: <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2019/10/21/warships-in-south-china-sea-will-invite-conflict-says-dr-m/1802234>.
- Scholvin, S. and Wigell, M. (2018) *Geo-Economics As Concept and Practice in International Relations, FIIA Working Paper*. Available at: <https://www.researchgate.net/publication/324602603%0AGeo-economics>.
- Sheng, Y. (2021) 'AUKUS deal to continue causing repercussions in transatlantic ties', *Global Times*, 17 June. Available at: <https://www.globaltimes.cn/page/202109/1234764.shtml>.



- Shirodkar, R. (2021) ‘Malaysia Says AUKUS Alliance May Lead to Arms Race, Provocation’, *Bloomberg*. Available at: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-18/malaysia-says-aucus-alliance-may-lead-to-arms-race-provocation>.
- Singapore Government Agency (2021) ‘Prime Minister Lee Hsien Loong’s Telephone Call with Australian Prime Minister Scott Morrison, 16 September 2021’, *Mfa.Gov.Sg*. Available at: <https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2021/09/20210916-PM-Call-With-Scott-Morrison>.
- Storey, I. (2020) ‘Malaysia and the South China Sea Dispute: Policy Continuity amid Domestic Political Change’, *ISEAS-Yusof Ishak Institute*, 1(2020), p. 10.
- Wigell, M. (2016) ‘Conceptualizing regional powers’ geoeconomic strategies: neo-imperialism, neo-mercantilism, hegemony, and liberal institutionalism’, *Asia Europe Journal*, 14(2), pp. 135–151. doi: 10.1007/s10308-015-0442-x.
- World Economic Forum (2016) *The Age of Economic Coercion: How Geo-politics is Disrupting Supply Chains, Financial Systems, Energy Markets, Trade and the Internet*. Available at: www.weforum.org.
- Zambelli, G. (2021) ‘AUKUS Effect: New Paths for International Trade?’, *ExportPlanning*, 29 September. Available at: <https://www.exportplanning.com/en/magazine/article/2021/09/29/aukus-effect-new-paths-for-international-trade/>.